Pengaruh PBB, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016

Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes
Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
Email: alfian.yanuar@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to examine the effect of Rural and Urban Land and Building Taxes, restaurant tax and entertainment tax on DKI Jakarta Regional Revenue in 2014-2016. The sampling technique uses purposive sampling. The sample of this study is 43 sub-districts of DKI Jakarta which are spread in 5 municipalities that representing DKI Jakarta and also representing all taxpayers who contributed to got those Regional Original Income (PAD). This study uses logistic regression analysis using the SPSS version 25 statistical program. The results obtained through the study state that Rural and Urban Land and Building Taxes, restaurant taxes and entertainment taxes have a significant effect on DKI Jakarta Regional Revenue (PAD) in 2014-2016. However, the entertainment tax has a significant negative effect on DKI Jakarta PAD.*

Keywords*: Rural and Urban Land and Building Taxes, restaurant tax, entertainment tax, Regional Original Income, DKI Jakarta*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah 43 kecamatan DKI Jakarta yang tersebar dalam 5 kotamadya yang merepresentasikan DKI Jakarta serta mewakili seluruh wajib Pajak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini menggunakan Analisa regresi logistik dengan menggunakan program statistik SPSS versi 25. Hasil yang didapatkan melalui penelitian menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta pada 2014-2016. Meski demikian pajak hiburan berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD DKI Jakarta.

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pajak restoran, pajak hiburan, Pendapatan Asli Daerah, DKI Jakarta.

LATAR BELAKANG

Suatu negara atau daerah-daerah yang ada di dalamnya sangat bergantung pada berbagai sumber pemasukan (penerimaan).Salah satu sumber pemasukan itu berasal dari pajak. Jumlah pajak yang bertambah besar pastinya akan menjadi berkah bagi pemerintah, daerah dan negara secara keseluruhan. Setiap daerah berharap dapat menunjukan aspek kemandirian dalam mengatasi masalah pendanaan. Aspek kemandirian yang dimaksud diwujudkan dengan menurunkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat oleh setiap daerah (pemerintah daerah) dengan membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bagian di dalam Pendapatan Asli Daerah sendiri adalah Pajak Daerah.

Karena keunikan setiap daerah tidaklah sama, tentu jumlah pajak yang masuk sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah antar daerah tidak mungkin sama.Di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan pajak daerah tertinggi. Beberapa penyebab yang menyebabkan jumlah pajak yang diterima provinsi DKI Jakarta sangatlah tinggi adalah jumlah penduduknya yang sangat besar, cepatnya pembangunan, hingga beragamnya jenis usaha.Soal pembangunan, lihat saja banyaknya bangunan dimana-mana, baik untuk tempat tinggal atau pun kegiatan usaha, yang sudah pasti dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Soal beragamnya jenis usaha, lihat saja jumlah restoranhingga tempat-tempat hiburan yang terus bertambah jumlahnya, yang akan menambah jumlah Pajak Daerah yang diterima.Keterbatasan tanah dan bangunan, yang disertai tingginya permintaan akan menyebabkan naiknya harga, dan dimana harga yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayar masyarakat lewat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Lalu, perkembangan jumlah restoran, yang menjual makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat DKI Jakarta, berpotensi menaikan jumlah penerimaan pajak restoran yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Begitupun juga dengan bertambahnya jumlah penyelenggaraan hiburan akibat keinginan (permintaan) yang tinggi, yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Penerimaan Pajak Daerah yang besarbelum tentu bebas dari masalah. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki ekspektasi (harapan) besar untuk mendapatkan kontribusi maksimal dari setiap Pajak Daerah, yang memaksimalkan pula total Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Apalagi setelah tahun 2013, target pemerintah terkait penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta tidak sesuai dengan penerimaanya. Tentunya permasalahan ini akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KAJIAN TEORI

Menurut (Resmi, 2017), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan (pendapatan) pemerintah dalam membiayai pengeluaran, baik rutin ataupun pembangunan. Sebagai salah satu sumber keuangan utama bagi negara, pemerintah berupaya menghimbau untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Upaya yang dilakukan dapat ditempuh baik dengan cara ekstensifikasi ataupun intensitifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan (beragam) peraturan untuk berbagai jenis pajak.

Sedangkan menurut Agoes dan Trisnawati, pajak dapat dikelompokan berdasarkan sifatnya, yakni pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada siapa yang menjadi subjek pajaknya. Pengenaan pajak subjektif harus didasari pada keadaan subjek pajaknya sebelum melihat kondisi objek pajaknya. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang benar-benar difokuskan pada (kondisi) objek tanpa memperhatikan kondisi subjek pajak.

(Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibayar masyarakat kepada daerah atas adanya suatu prakarsa, yang digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat daerah itu sendiri tanpa mendapat imbalan secara langsung, serta bersifat memaksa dengan adanya UU yang mengaturnya. Sedangkan menurut UUD Nomor 28 Tahun 2009, ”Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Lewat definisi-definisi yang ada di atas, Pajak Daerah adalah pajak langsung maupun tidak langsung yang bersifat objektif. Artinya Pajak Daerah adalah pajak yang dapat dibayar langsung oleh penanggung-jawab/pemikul ataupun ditanggung/dibayarkan dahulu oleh penanggung pajak

kepada penanggung-jawab/pemikul pajak, sebelum dibayarkan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan apa yang menjadi objek pajaknya.

Menurut (Budi S., 2017), Bumi adalah permukaan bumi, baik tanah, perairan, serta tubuh bumi yang ada di bawahnya, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang. Sementara itu, bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang dibangun, ditanamkan, atau dilekatkan secara tetap (permanen) pada tanah atau perairan yang berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, "Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering."Dengan sumber yang sama, maka, "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran." Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, "Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran."Sehingga secara singkat, pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggara hiburan.

Menurut (Yanuar, 2016), salah satu keterbatasan sumber daya alam yang ada di Jakarta adalah ruang terbuka (tanah). Kelangkaan akan memaksa orang-orang melakukan pilihan-pilihan yang akan menimbulkan biaya. Kelangkaan akan menyebabkan harga suatu barang/jasa yang diminta menjadi lebih mahal. Artinya, harga tanah dan bangunan yang semakin mahal akan menyebabkan jumlah pajak PBB P2 turut bertambah. Apalagi setiap bangunan yang sudah dimiliki oleh seseorang, suatu badan atau pihak lain harus/ berpotensi dikenakan pajak PBB. Itu artinya pertumbuhan PBB P2 akan sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan-kebutuhan fisik.Semua orang pasti butuh makan, dan semakin banyak orang yang lebih memilih makan di restoran. Apalagi restoran sendiri dipengaruhi faktor kewirausahawan dan inovasi jenis makanan yang beragam. Kedua hal ini yang menjadikan restoran berpotensi memberikan jumlah pajak yang besar sebagai pendapatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya hiburan memang bukan kebutuhan utama. Bila dilihat hiburan merupakan suatu kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman keberadaan (objek-objek) hiburan memang penting dalam kehidupan manusia. Dengan banyaknya hiburan, ditambah keinginan yang tinggi terhadap sarana hiburan, maka akan menambah jumlah pemasukan si penyelenggara hiburan. Itu artinya akan ada penambahan jumlah pendapatan daerah lewat pajak.Itu artinya pajak hiburan yang semakin tinggi karena beragamnya jenis hiburan akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

Menurut (Frangky Martinus Mea *et al*., 2017), PBB dan pajak restoran memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. Sedangkan pajak hiburan disebut belum dapat memberi pengaruh signifikan terhadap PAD di daerah tersebut. Berhubung tidak didukungnya analisa milik Franky Martinus Mea, dkk. dengan uji statistik, maka digunakanlah penelitian milik (Sunanto, 2015), yang mengatakan bahwa Pajak Daerah seperti PBB, pajak restoran dan pajak hiburan, memberi pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Musi Banyuasin.

Untuk mendukung analisa yang ada, digunakan pula beberapa penelitian yang lain. Menurut (Yusran dan Siregar, 2017), PBB memberi pengaruh positif terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan penelitian (Kristianti, 2017), pajak restoran dapat memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk pada 2013-2016. Menurut (Bahmid dan Wahyudi, 2018), pajak hiburan dapat memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2012-2016. Terakhir, berdasarkan

penelitian (Widodo dan Guritno, 2017), didapati bahwa pajak restoran dan pajak hiburan memberi pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta pada 2010-2014.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:

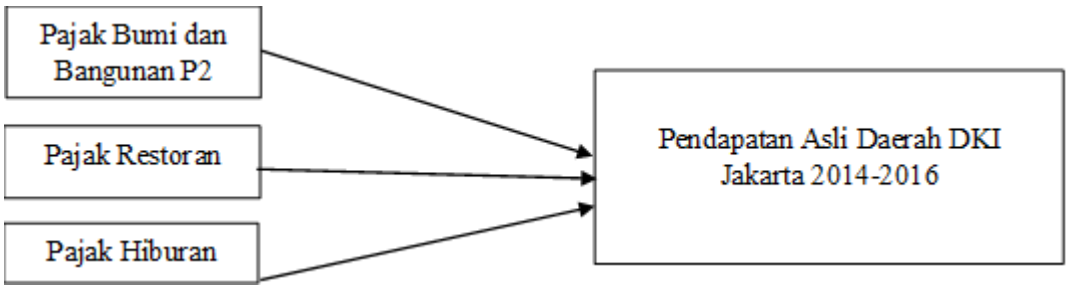

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis dari model yang dibangun di atas adalah sebagai berikut:

H_1: Terdapat pengaruh positif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada tahun 2014-2016.

H_2: Terdapat pengaruh positif pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada tahun 2014-2016.

H_3: Terdapat pengaruh positif pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada tahun 2014-2016.

METODOLOGI

Objek penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), pajak restoran, dan pajak hiburan. Objek-objek tersebut akan diteliti terkait kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dalam rentang 2014-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah non-probabilty sampling atau pemilihan sampel tak acak. Sedangkan teknik penelian yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling (sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan/ dipertimbangkan sebelumnya). Jumlah data yang digunakan untuk penelitian ini, berjumlah 129 data dari total 43 kecamatan yang tersebar dalam 5 kotamadya yang berada di dalam wilayah DKI Jakarta dalam 3 tahun (2014-2016).

Variabel operasional dalam penelitian ini terdiri atas2 jenis variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, pajak restoran dan pajak hiburan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016.

Setiap variabel yang digunakan, baik variabel independen maupun dependen dapat diukur secara langsung dengan *proxy* tertentu. Variabel independen menggunakan *proxy* kontribusi pajak daerah, sedangkan variabel dependen menggunakan *proxy* efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Daerah $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi Pajak Daerah atau Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} *100\%$

Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Perencanaan Pendapatan Asli Daerah}} *100\%$

Dalam penelitian ini dilakukanuji statistik deskriptif menggunakan SPSS versi dua puluh limauntuk menganalisis data yang tersedia.Beberapa pengujian yang dilakukan dengan SPSS versi 25 adalah uji statistik deskritif, uji asumsi klasik, uji korelasi (R), uji determinasi (*R-squares*), uji signifikansi t, hingga uji simultan F.

HASIL UJI STATISTIK

Sebelum melakukan melakukan pengujian statistik, dilakukan adanya *outlier* data, yakni dengan membuang beberapa data atau sampel yang dapat memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik. Dengan dilakukannya sistem *outlier* data, maka penelitian hanya menggunakan total 123 data (41 sampel) dari total 129 data (43 sampel) yang tersedia. Setelah dilakukannya *outlier* data, maka uji statistik dapat dilakukan.

Uji statistik deskriptif adalah uji yang menggambarkan tentang ringkasan singkat dari setiap variabel penelitian yang digunakandengan melihat nilai *mean*, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Itu berarti setiap variabel penelitian yang digunakan memiliki nilai statistik deskriptif masing-masing. Hasil uji statistik deskriptif untuk setiap variabel independen menggunakan *proxy* kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD. Sedangkan hasil uji statistik deskriptif untuk variabel dependen menggunakan *proxy* efektivitas Penerimaan Pajak Daerah. Berikut ini hasil yang didapat lewat SPSS versi 25 terkait uji statistik deskriptif antar variabel.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics - Combined

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PBB	123	.001051	.083207	.02274907	.018374860
P.Resto	123	.000020	.095218	.02149648	.024585013
P.Hiburan	123	.000000	.173999	.02202032	.033686735
PAD	123	.002582	.048893	.02161954	.011763755
Valid N (listwise)	123				

Sumber: *Output* SPSS Versi 25

Kesamaan yang di dapat atas uji statistik deskriptif di atas adalah nilai maksimum untuk setiap variabel independen didominasi kecamatan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Kecuali untuk pajak hiburan, dimana konstribusi maksimal berasal dari Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Sedangkan seluruh nilai minimum yang didapat berasal dari kecamatan di wilayah Jakarta Utara, terutama Kecamatan Kepulauan Seribu. Rata-rata, setiap wilayah memberi konstribusi pajak (variabel independen) sebesar 2,1% hingga 2,2%.

Untuk efektivitas penerimaan PAD, nilai maksimum diberikan oleh Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Sedangkan penerimaan minimal, atau wilayah dengan konstribusi minimal terhadap PAD DKI Jakarta, berasal dari Kecamatan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Rata-rata setiap wilayah memberikan konstribusi sebesar 2,1%-2,2% terhadap penerimaan PAD DKI Jakarta dalam rentang 2014-2016.

Uji asumsi klasikpun berhasil dilalui dalam penelitian ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa uji asumsi klasik menandakan bahwa hasil penelitian ini dapat menghasilkan suatu persamaan regresi yang baik. Dengan dilewatinya uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedasitas, maka penelitian ini dikatakan dapat membentuk suatu persamaan regresi yang baik. Adapun uji normalitas berbasis pada uji Kolgomorov-Smirnov, uji autokorelasi berdasar pada uji Durbin Watson, uji multikolonieritas dengan uji t dan VIF, serta uji heteroskedasitas menggunakan uji Spearman. Berikut ini hasil uji asumsi yang telah didapatkan.

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian	**Syarat Lulus Uji**	**Hasil**
Normalitas	K-s ≥ 0,05	0,08
Autokorelasi	DW, dU < DW < 4-dU	1,739 < 1,812 < 2,261
Multikolonieritas	t ≥ 0,1 & VIF	X1: 9,185; 2,532 X2: 1,994; 2,692 X3: -2,383; 1,415
Heterokedasitas	Sig. Spearman ≥ 0,05	X1: 0,233 X2: 0,195 X3: 0,366

Sumber: *Output* SPSS Versi 25

Selain uji asumsi klasik, penelitian harus dikatakan layak uji, maka dari itu penelitian harus melihat hasil signifikansi pada satu tabel *output* SPSS versi 25, yakni tabel ANOVA. Dengan melihat nilai signifikansi ≤ 0,05; maka penelitian (kuantitatif) yang dilakukan dikatakan layak uji. Selain itu, tabel ANOVA juga dapat dipakai untuk uji F. Bila F uji lebih besar dari tabel F, maka variabel independen yang digunakan dikatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya. Berikut ini hasil dari tabel ANOVA yang dimaksud.

Tabel 3. Tabel ANOVA

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.012	3	.004	85.471	.000[b]
	Residual	.005	119	.000		
	Total	.017	122			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), P.Hiburan, PBB, P.Resto

Sumber : *Output* SPSS Versi 25

Dengan melihat hasil diatas, maka penelitian dengan nilai signifikansi 0,000 dikatakan layak untuk diuji. Selain itu dengan nilai F sebesar 85,471 yang lebih besar dari nilai F tabel

sebesar 2,68 (dengan n=123 dan k=3), maka variabel-variabel bebas yang ada mempengaruhi variabel terikat secara simultan (keseluruhan/*general*).

Berikutnya berhubungan dengan nilai R dan R-*square* (R^2). Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukan nilai R sebesar 0,826 dan R serta R-*squares* atau Adjusted R-*squares* sebesar 0,683 dan 0,675. Artinya setiap variabel bebas yang digunakan, yakni PBB P2, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan variabel terikatnya, yakni PAD DKI Jakarta tahun 2014-2016. Sedangkan lewat R-*squares* atau *adjusted* R-*squares* yang didapat, menandakan variabel-variabel bebas dalam penelitian berpengaruh cuku besar terhadap variabel terikat yang digunakan dibandingkan variabel atau faktor-faktor lainnya. Artinya PBB, pajak restoran dan pajak hiburan sudah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap PAD DKI Jakarta pada 2014-2016 dibandingkan variabel (jenis pajak) atau fakor-faktor lainnya.

Tabel 4. Tabel Model Penelitian

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.826[a]	.683	.675	.006706127	1.812

a. Predictors: (Constant), P.Hiburan, PBB, P.Resto

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: *Output* SPSS Versi 25

Pada akhirnya, sampai juga pada uji t, uji terpenting yang dilihat untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Itu artinya kita dapat melihat masing-masing pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap (efektivitas penerimaan) PAD DKI Jakarta pada tahun 2014-2016. Hasil uji t dapat dilihat melalui tabel koefisien dari SPSS versi 25 yang digunakan, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Model Hipotesis Penelitian	T-statistik	*Uns. B*
$H_{1:}$ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan→ Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 2014-2016	9,145	0,483
$H_{2:}$ Pajak restoran→ Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 2014-2016	1,994	0,081
$H_{3:}$ Pajak hiburan→ Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 2014-2016	- 2,383	- 0,051

Sumber: *Output* SPSS versi 25

Dengan didapatnya hasil *Unstandardized B*di atas didapatilah persamaan sebagai berikut.

$$Y = 0{,}010 + 0{,}483\ X1 + 0{,}081\ X2 - 0{,}051\ X3 + \mathcal{E}$$

$$PAD = 0{,}010 + 0{,}483\ PBB + 0{,}081\ P.Resto - 0{,}051\ P.Hib + \mathcal{E}$$

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5 sekaligus menunjukkan bahwa H_1 dan H_2 tidak ditolak. Sedangkan H_3 ditolak.

DISKUSI

Tidak sesuainya H_3dengan hasil uji t yang didapat dikarenakan perbedaan nilai pajak hiburan dengan pajak daerah lainnya secara konstribusi. Meskipun berpotensi tinggi, pajak hiburan memiliki nilai penerimaan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya seperti penerimaan PBB, pajak restoran, dan pajak lainnya. Sehingga, secara konstribusi, apabila pajak hiburan bertambah sedangkan PBB, pajak restoran atau pajak lainnya konstan atau berkurang, maka penerimaan PAD DKI Jakarta pada tahun 2014-2016 akan menurun. Sebaliknya, apabila pajak hiburan berkurang atau konstan sedangkan PBB, pajak restoran atau pajak lainnya bertambah, maka penerimaan PAD DKI Jakarta pada tahun 2014-2016 akan ikut meningkat. Namun, setiap kenaikan jenis pajak daerah pasti akan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta secara nilai nominal (nilai sebenarnya).

PENUTUP

Dengan membandingkan hasil penelitian yang didapat dengan teori, hipotesa dan penelitian terdahulu, didapatilah kesimpulan akhir bahwaPajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016. Semakin besar rasio kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016. Semakin besar rasio penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Namun, pajak hiburan memiliki pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016. Alasan bahwa terdapat perbedaan hipotesa dengan hasil (pembahasan) terkait pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah karena hasil pembahasan melihat rasio kontribusi pajak hiburan DKI Jakarta yang kecil terhadap Pendapatan Asli Daerahnya pada 2014-2016 dibandingkan rasio kontribusi yang diberikan PBB P2 maupun pajak restoran. Itu mengapa (rasio kontribusi) pajak hiburan dinilai berpengaruh negatif terhadap PAD DKI Jakarta. Akan tetapi secara nominal (nilai sebenarnya), semakin tinggi nilai pajak hiburan pasti akan menguntungkan DKI Jakarta dikarenakan Pendapatan Asli Daerahnya yang semakin tinggi. Begitu pun dengan pajak-pajak lainnya.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data di dalam penelitian ini berkaitan dengan ketidakpastian jumlah nilai PAD per kecamatan, keterbatasan data yang berkaitan dengan data tahun terbaru (teraktual), keterbatasan data pajak per kecamatan, ketidaksamaan total Pajak Daerah seluruh kecamatan dengan total Pajak Daerah/ provinsi, serta tidak digunakannya variabel interverning dan/atau moderating yang berpengaruh terhadap nilai Pajak Daerah dan nilai Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dalam kurun waktu 2014-2016.

Berikut ini saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu Badan Pajak dan Restribusi Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak Pajak Daerah dalam membayar dan melapor pajak secara jujur, agar penerimaan dan pemasukan daerah dapat bertambah.Bagi Badan Pajak dan Restribusi Daerah DKI Jakarta, diharapkan untuk meningkatkan kinerja setiap tenaga kerja mereka, terutama dalam hal menambah tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan survei dan dalam hal penyediaan informasi teraktual. Bagi masyarakat yang menjadi subyek atau

wajib pajak, diharapkan untuk memungut/ menerima, membayar dan melaporkan pajak tersebut dengan sejujur-jujurnya demi menambah pemasukan daerah.Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang sekarang telah dilakukan atau pun dengan bijaksana mencari dan menentukan topik serta variabel lainnya yang memberikan pembahasan baru seputar perkembangan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

___, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

___, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang "Pajak Hiburan".

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Arifin, E. Zainal. (2015). *Metode Penulisan Ilmiah*. Tangerang: Pustaka Mandiri.

Bahmid, S.H dan Wahyudi, H. (2018). *Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, Vol.18, No. 1, ISSN: 1693-7597.*

Ghozali, H. Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Irham, A.T.E, Bachri, S., dan Halim, M. (2016). *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Jurnal Equilibrium Vol. 1, No.1, Hal. 61-67. ISSN: 2089-2152.*

Kakunsi, I. E. (2013). *Analisis Pelaporan dan Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Pada Dinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal EMBA, Vol.1, No. 4, Hal. 1934-1945.ISSN 2303-1174.*

Kristanti, U.M. (2017). *Efektivitas Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2016. Simki-Economic, Vol. 1, No. 7. ISSN: BBBB-BBBB*

Lohonauman, I.L. (2016). *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA, Vol.4, No.1 Hal. 172-180. ISSN 2303-1174.*

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Mea, F.M., Panelewen, V.V.J., dan Mirah, A.D.P. (2017*). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. Agri-SosioEkonomiUnsrat, Vol. 13 (2A), Hal. 323-334. ISSN 1907– 4298.*

Mintahari, M.W. and Lambey, L. (2016). *Analysis Of Restaurant Tax Constribution Toward Local Owned Income (PAD) South Minahasa District in The Year Of 2012-2014. Jurnal EMBA, Vol. 4, No.2, Hal. 641-651. ISSN 2303-1174.*

Mulyono, Sri. (1991). *Statistika untuk Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Newbold, Paul and friends. (2013). *Statistics for Business and Economics*. *United States of America: Pearson*.

Pasulu, S. R. dan Wokas, H. R. N. (2015). *Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA,Vol. 3, No. 2, Hal. 1008-1015. ISSN 2303-1174.*

Polii, S. O. (2014). *Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado. Jurnal EMBA, Vol. 2, No. 4, Hal. 751-756. ISSN 2303-1174.*

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rooy, F.D dan Burdiaso, N. (2015). *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Empat. Jurnal EMBA, Vol.3, No.4, Hal. 451-461.ISSN 2303-1174.*

Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sunanto (2015). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu. Jurnal ACSY, Vol. 2, No. 1, Hal. 1-10. ISSN: 2407-2184.*

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Buku 2 Edisi 10 Jakarta: Salemba Empat.

Watuseke, C. and Pangemanan, S.S. (2016). *Analysis Of Potential Entertainment Tax in The City Of Manado*. *Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 1, Hal. 524-535. ISSN 2303-1174.*

Widodo, W.I. dan Guritno, B. (2017). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Yogyakarta. Jurnal Visi Management, Vol.2, No.2. Hal. 128-138.*

Yanuar. 2016. *Ekonomi Makro*. Tangerang: Pustaka Mandiri.

Yusran, R.R. dan Siregar, D.L. (2017). *Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal AKRAB JUARA, Vol. 2, No. 3, Hal 73-84.*